

POLICY BRIEF

KAJIAN PERAN PENTAHELIX DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN PASURUAN

Tahun 2024

kerjasama



BAPPETBANGDA
KABUPATEN PASURUAN



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

“POLICY BRIEF”

PERAN PENTAHHELIX DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM DI KABUPATEN PASURUAN

A. Latar belakang

Kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan merupakan tantangan serius yang membutuhkan solusi lintas-sektor. Berdasarkan data terbaru, walaupun terjadi penurunan kemiskinan ekstrem di Provinsi Jawa Timur, angka di Kabupaten Pasuruan justru menunjukkan kenaikan pada tahun 2022 sebesar 1,56% atau 25.790 jiwa. Kolaborasi Pentahelix (pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan media) dipandang sebagai strategi yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui sinergi yang kuat di antara aktor-aktor ini. Melalui kolaborasi strategis, diharapkan setiap aktor dapat mengoptimalkan peran mereka, mulai dari regulasi kebijakan, dukungan ekonomi, penelitian, hingga pengawasan sosial.

Namun, beberapa tantangan yang ditemukan di lapangan, seperti data kemiskinan yang tidak akurat, keterbatasan CSR (Corporate Social Responsibility), dan minimnya koordinasi antar-aktor, menghambat efektivitas program pengentasan kemiskinan ekstrem di Pasuruan. Dibutuhkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi agar kolaborasi ini mampu menciptakan dampak yang optimal.

B. Temuan lapangan

Bagian ini membahas temuan utama dari penelitian mengenai peran pentahelix dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan. Fokus pembahasan mencakup lima aspek kunci yang diajukan dalam pertanyaan penelitian. Pertama, analisis peran masing-masing aktor pentahelix—pemerintah, bisnis, akademisi, lembaga masyarakat sipil, dan media—dalam program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Kedua, kondisi kolaborasi antar-aktor dalam pelaksanaan program tersebut. Ketiga, identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas program serta peran kolaboratif pentahelix. Keempat, partisipasi dan kontribusi masyarakat terdampak dalam keterlibatan dengan aktor-aktor pentahelix dalam pelaksanaan program.

1. Peran masing-masing aktor pentahelix

AKTOR PENTAHHELIX	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM TERTINGGI	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM SEDANG	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM TERENDAH
Pemerintah	Fokus pada regulasi, pendataan, bantuan, pendampingan, dan pembangunan infrastruktur. Pendataan masih menjadi problem.	Fokus pada regulasi, pendataan, bantuan, pendampingan, dan pembangunan infrastruktur. Pendataan masih menjadi problem.	Fokus pada regulasi, pendataan, bantuan, pendampingan, dan pembangunan infrastruktur. Pendataan masih menjadi problem.
Bisnis	Jumlah perusahaan yang terbatas. Sangat sedikit	Banyak jumlah perusahaan namun	- Kawasan pegunungan: Sebagian kecil terlibat

AKTOR PENTAHELIX	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM TERTINGGI	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM SEDANG	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM TERENDAH
	peran CSR.	keterlibatan mereka belum merata. Forum komunikasi CSR tidak berjalan.	dalam pembangunan desa. - Kawasan industri: Banyak CSR namun masih belum merata. Forum komunikasi CSR tidak berjalan.
Akademisi	Pendampingan tidak berkelanjutan dalam program.	Pendampingan tidak berkelanjutan dalam program.	Sebagian pendampingan berkelanjutan dalam program.
Masyarakat (Komunitas lokal, LSM, dst)	- Kurang begitu berperan. - Pihak terdampak memandang LSM sebagai kelompok yang dilihat negatif dan tidak ada kontribusi signifikan. - Dominan dalam pengawasan anggaran desa namun mengganggu proses pembangunan dengan mengatasnamakan pengawasan.	- Kurang begitu berperan. - Pihak terdampak memandang LSM sebagai kelompok yang dilihat negatif dan tidak ada kontribusi signifikan. - Dominan dalam pengawasan anggaran desa namun mengganggu proses pembangunan dengan mengatasnamakan pengawasan.	- Kawasan pegunungan: Dukungan tokoh adat membuat masyarakat memiliki peranan penting dalam membantu pelaksanaan program kemiskinan. - Kawasan industri: Peranan masyarakat tidak begitu tampak. Pihak terdampak memandang LSM secara negatif. Dominan dalam pengawasan anggaran desa namun mengganggu proses pembangunan.
Media	Mewartakan kondisi desa. Sebagian terlibat di “media bodrex” kolaborasi dengan LSM.	Mewartakan kondisi desa. Sebagian terlibat di “media bodrex” kolaborasi dengan LSM.	Mewartakan kondisi desa. Sebagian terlibat di “media bodrex” kolaborasi dengan LSM.

2. Kondisi kolaborasi antar aktor pentahelix

ISU-ISU	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM TERTINGGI	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM SEDANG	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM TERENDAH
Kondisi Kolaborasi	Kolaborasi antar pentahelix terkesan egosentris. Dominan kerjasama antara dua aktor saja (Misal, pemerintah dan CSR, pemerintah dan akademisi).	Kolaborasi antar pentahelix terkesan egosentris. Dominan kerjasama antara dua aktor saja (Misal, pemerintah dan CSR, pemerintah dan akademisi).	Kolaborasi antar pentahelix terkesan egosentris. Dominan kerjasama antara dua aktor saja (Misal, pemerintah dan CSR, pemerintah dan akademisi).
Kendala	- Masing-masing aktor memiliki master plan sendiri. - Tiadanya peran CSR karena minimnya jumlah perusahaan. - Niat membantu atau meminta sesuatu (Kasus LSM)? - Kepemimpinan lokal/agama tidak berjalan.	- Masing-masing aktor memiliki master plan sendiri. - Niat membantu atau meminta sesuatu (Kasus LSM)?	- Masing-masing aktor memiliki master plan sendiri. - Niat membantu atau meminta sesuatu (Kasus LSM)? - “Perilaku negatif LSM” membatasi ruang gerak pemerintah untuk mendekati CSR.
Peluang	Beberapa desa memiliki potensi aset seperti susu dan kotoran sapi di Lekok.	Kawasan industri menyediakan peluang ekonomi yang cukup signifikan.	- Kawasan pegunungan memiliki industri pertanian, wisata, dan kepemimpinan adat sebagai modal sosial. - Kawasan industri menyediakan peluang ekonomi yang cukup signifikan.

3. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan program dan peran pentahelix

Efektivitas kolaborasi pentahelix dalam pengentasan kemiskinan ekstrem dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kebijakan pemerintah, kualitas data kemiskinan, karakter masyarakat, tingkat partisipasi, tipologi mata pencaharian, peran kepemimpinan lokal, kualitas pendamping program, keberlanjutan program, fasilitas dan infrastruktur, serta kurangnya peran LSM. Sementara itu, faktor eksternal mencakup keterlibatan perusahaan melalui CSR, peran akademisi dalam pendampingan, dan kontribusi media dalam mempromosikan program. Kedua kelompok faktor ini harus diperhatikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam program pengentasan kemiskinan.

4. Partisipasi dan kontribusi masyarakat terdampak

ISU-ISU	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM TERTINGGI	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM SEDANG	DAERAH KEMISKINAN EKSTREM TERENDAH
Partisipasi	Rendah partisipasi.	Rendah partisipasi namun beruntung dengan letak geografis yang cukup dekat dengan industri.	- Masyarakat pegunungan: tinggi partisipasi. - Masyarakat industri: rendah partisipasi namun beruntung dengan letak geografis yang dekat industri.
Kontribusi	- Cenderung pasif dan hanya menunggu bantuan. Tidak aktif terlibat dalam inisiatif atau kegiatan yang dapat memperbaiki keadaan mereka sendiri. - Meski kaya, namun tidak malu untuk menerima bantuan. - Marah jika dicoret dari daftar penerima bantuan.	- Cenderung pasif dan menganggap bantuan sosial sebagai 'gaji' yang harus rutin diterima. - Beruntung karena cukup dekat dengan kawasan industri.	- Masyarakat pegunungan merasa malu jika dianggap miskin. Tingkat sosial dan swadaya mereka sangat tinggi. - Masyarakat industri masih menganggap bantuan sosial sebagai gaji, beruntung karena dekat dengan kawasan industri, dan berpendidikan cukup.

C. Analisis isu

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya kolaboratif untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di Pasuruan. Beberapa masalah yang paling krusial adalah sebagai berikut:

1. Ketidakakuratan Data Kemiskinan

Akurasi data adalah fondasi untuk menentukan sasaran program yang tepat. Kabupaten Pasuruan menghadapi kendala serius dalam hal validitas data kemiskinan yang menyebabkan ketidakcocokan antara bantuan dan kebutuhan nyata masyarakat. Data yang tidak konsisten ini mengakibatkan sasaran program pengentasan kemiskinan kurang optimal.

2. Peran CSR yang Belum Merata

Meskipun sektor bisnis melalui CSR memainkan peran dalam pemberdayaan ekonomi lokal, kontribusi mereka masih terbatas di daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi. Di daerah pegunungan, keterlibatan CSR dalam pembangunan masyarakat kurang merata, sehingga potensi peningkatan ekonomi masyarakat setempat belum sepenuhnya terealisasi.

3. Partisipasi Masyarakat yang Terbatas

Masyarakat di beberapa wilayah cenderung pasif dan menganggap bantuan sosial sebagai 'gaji tetap'. Di kawasan pegunungan, partisipasi masyarakat lebih aktif berkat kepemimpinan adat yang kuat, namun di daerah lain partisipasi ini seringkali terhambat oleh pola pikir masyarakat yang bergantung pada bantuan eksternal.

4. Kurangnya Koordinasi Antara Aktor Pentahelix

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat sipil, dan media terkesan berjalan secara terpisah dan egosentris. Dalam banyak kasus, keterlibatan mereka hanya terjadi antara dua aktor utama, misalnya antara pemerintah dengan akademisi atau bisnis dengan pemerintah, sehingga kolaborasi yang utuh belum tercapai.

D. Rekomendasi

NO.	REKOMENDASI KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	AKTOR PENTAHHELIX
1	Perbaikan data kemiskinan dan profil penerima yang valid	Program validasi dan pemutakhiran data kemiskinan	- Sinkronisasi data antara pusat dan daerah. - Evaluasi berkala basis data terpadu.	Kemensos, Kemenko PMK, Kemendes, Bappelitbangda, Dinas Sosial, BPS
2	Penguatan kepemimpinan lokal (agama dan adat)	Peningkatan peran lembaga adat dan agama dalam pengentasan kemiskinan	- Sosialisasi program adat dalam kemiskinan. - Penerapan aturan Perbup Pasuruan No. 12/2021.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pendidikan, Lembaga Adat, Kemenag, Akademisi
3	Optimalisasi dana CSR dan Forum CSR	Program CSR yang merata dan berkelanjutan	- Penyusunan master plan CSR. - Evaluasi Perbup No. 27/2018 terkait CSR.	Bappelitbangda, Forum CSR, Disnaker, Disperindag
4	Fokus pada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan	Program pelatihan vokasional dan pendidikan kewirausahaan	- Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar. - Program peningkatan mindset untuk keluarga miskin.	Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5	Refocusing peran LSM	Program pemberdayaan LSM dalam pengentasan kemiskinan	- Revitalisasi peran LSM dalam pelaksanaan program kemiskinan. - Kolaborasi antara LSM dan pemerintah daerah.	Dinas Sosial, Bappelitbangda, Forum LSM, Bakesbangpol
6	Mendorong media mainstream untuk meningkatkan kesadaran	Program peningkatan peran media dalam kampanye sosial	- Pelatihan jurnalistik dan kemitraan dengan media untuk menyebarluaskan kondisi desa miskin.	Dinas Kominfo, Media Lokal
7	Peningkatan sinergi antara aktor Pentahelix	Program kolaborasi multi-stakeholder	- Pembentukan forum koordinasi rutin antara pemerintah, akademisi, bisnis, masyarakat, dan media.	Bappelitbangda, Dinas Kominfo, Forum CSR, Akademisi, Disnaker, Disperindag
8	Pengintegrasian adat dalam program pengentasan kemiskinan	Program berbasis adat untuk pemberdayaan ekonomi	- Penerapan peraturan daerah terkait peran adat dalam pengentasan kemiskinan. - Pelibatan tokoh adat dalam program.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lembaga Adat, Dinas Pendidikan

NO.	REKOMENDASI KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	AKTOR PENTAHELIX
9	Integrasi nilai-nilai agama dalam kebijakan dan program	Program berbasis nilai agama untuk pengentasan kemiskinan	- Melibatkan pemimpin agama dalam sosialisasi nilai gotong royong dan kepedulian sosial.	Dinas Sosial, Kemenag, Tokoh Agama, Dinas Pendidikan
10	Peninjauan Perda terkait peraturan daerah	Program revisi dan penyusunan regulasi yang mendukung pengentasan kemiskinan	- Revisi Perda Kabupaten Pasuruan No. 2/2021. - Melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan peraturan baru.	DPRD, Bappelitbangda, Bagian Hukum Pemda
11	Penyusunan roadmap penghapusan kemiskinan ekstrem	Program penyusunan roadmap pengentasan kemiskinan dengan target tahunan	- Penyusunan peta jalan dan target capaian 2024. - Monitor dan evaluasi berkala roadmap kemiskinan ekstrem.	Bappelitbangda, Dinas Sosial
12	Upaya strategis menurunkan beban pengeluaran masyarakat miskin	Program harmonisasi program sosial untuk menurunkan beban pengeluaran	- Harmonisasi program bantuan sosial. - Pemutakhiran basis data terpadu penerima manfaat.	Kemensos, Dinas Sosial, Bappelitbangda, BPJS Kesehatan
13	Pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan pendapatan	Program pemberdayaan dan perlindungan UMKM	- Pelatihan dan fasilitasi usaha bagi UMKM. - Pengembangan produk lokal yang berpotensi menciptakan nilai tambah.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
14	Peninjauan ulang target kemiskinan ekstrem	Program penyesuaian target penurunan kemiskinan ekstrem berdasarkan analisis capaian	- Evaluasi kebijakan kemiskinan ekstrem 2024. - Pembaruan kebijakan program sesuai perkembangan ekonomi dan sosial.	Bappelitbangda, Dinas Sosial
15	Penanganan khusus untuk wilayah dengan status sengketa tanah	Pendekatan atau aturan khusus dalam menangani sengketa tanah yang telah berlangsung selama bertahun-tahun	- Evaluasi dan MoU antara Kecamatan/desa dan TNI AL. - Relokasi desa.	TNI AL, Kecamatan/Desa, Bappelitbangda, Dinas Sosial, Tokoh Agama, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
16	Peninjauan anggaran belanja pusat dan	Program evaluasi anggaran dan alokasi	- Evaluasi Anggaran Belanja Daerah setiap	Dinas Keuangan Daerah,

NO.	REKOMENDASI KEBIJAKAN	PROGRAM	RENCANA AKSI	AKTOR PENTAHHELIX
	daerah terkait kemiskinan	dana untuk pengentasan kemiskinan	periode. - Alokasi dana lebih tepat sasaran untuk penurunan kemiskinan.	Bappelitbangda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

E. Kesimpulan

Pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasuruan dapat diperkuat melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan Pentahelix dengan peningkatan akurasi data, distribusi peran yang merata dalam CSR, serta integrasi nilai-nilai lokal. Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan upaya ini dapat mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem sekaligus mendorong kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan lokal ini berpotensi menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing bagi masyarakat Pasuruan.